

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Menjadi negara yang maju tentu menjadi harapan masyarakat di semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Dengan jumlah sumber daya manusia yang berkisar 249 juta jiwa tentu menjadi potensi penggerak bagi pembangunan. Harapan tersebut kemudian coba diwujudkan melalui berbagai upaya pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Namun dalam prosesnya, pembangunan yang dilakukan seringkali menghadapi berbagai kendala, kendala tersebut seperti misalnya masalah sosial. Masalah sosial tersebut dapat berbagai macam bentuk, namun salah satu masalah sosial yang berpotensi menghambat pembangunan adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan memang menjadi masalah yang serius, sebab hal tersebut dikhawatirkan membawa dampak sosial yang bersifat negatif, seperti kriminalitas, perdagangan narkoba, eksploitasi anak, masalah kesehatan dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional pada September tahun 2013 lalu, tampak jumlah masyarakat miskin di Indonesia berkisar 28,55 juta jiwa atau 11,47% dari total populasi penduduk Indonesia yang berkisar 249 juta jiwa, 10,63 juta jiwa masyarakat miskin di antaranya tinggal di kawasan perkotaan dan 17,92 juta jiwa tinggal dipedesaan. Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berkisar pada angka 73.29 (BPS, 2013).

Begitu pentingnya juga permasalahan ini untuk di telaah adalah sejalan dengan upaya untuk pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, yang nantinya berguna untuk meminimalisir masalah tersebut. Kalimantan Barat dalam hal ini, juga menghadapi masalah kemiskinan. Hal tersebut di lihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat bulan September 2013, sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2013

Penduduk Miskin		Penduduk Miskin (%)	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia(Nasional)
Maret	369.010	8.24 %	70.31	73.29
September	394.170	8.74 %		

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2014)

Berdasarkan tabel di atas, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat sekitar 394.170 ribu jiwa penduduk yang dikategorikan miskin dengan persentase sebesar 8,74 % dari jumlah penduduk yang berkisar sekitar 4.508.968 jiwa, dengan 77.770 ribu jiwa diantaranya tinggal di perkotaan atau sebesar 19,71%. Hal ini cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan bulan Maret 2013 yang berjumlah 369.010 jiwa atau 8,24 persen, meningkat sekitar 25.160 jiwa atau mengalami kenaikan 0,50 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 berada pada angka 70.31 atau berada di bawah angka rata-rata nasional yang berkisar pada angka 73.29 (BPS, 2013).

Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi, menjadi salah satu kawasan dengan jumlah penduduk yang banyak serta memiliki keanekaragaman penduduk yang perbedaan latar belakang suku, budaya, agama, dan lain-lain. Kota Pontianak sendiri terdiri dari 6 kecamatan dengan 29 kelurahan. Data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak yang dihimpun oleh BPS pada tahun 2012 memperlihatkan jumlah penduduk kota Pontianak berkisar 575.843 jiwa dengan luas wilayah 107,81 km² serta kepadatan penduduk 5.341 jiwa/km². Adapun jumlah masyarakat dalam kategori miskin berkisar sekitar 32511 jiwa (BPS,2013). Gambaran kemiskinan jugatampak di beberapa kawasan di Kota Pontianak. Seperti di kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk, Luas, & Fasilitas di Kecamatan Pontianak Timur, Tahun 2013

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Keluarga Miskin	Luas km ²	Fasilitas				
				Pendidikan			Kesehatan	
				SD	SMP	SMA	Puskesmas	Posyandu
1. Tanjung Hilir	11.564	683	0,30	6	-	-	-	4
2. Tanjung Hulu	18.528	684	1,09	5	1	-	1	10
3. Dalam Bugis	19.167	1513	1,98	5	2	1	1	11
4. Saigon	15.908	516	2,80	4	3	4	1	4
5. Parit Mayor	4.020	385	1,06	1	-	-	1	2
6. Tambelan Sampit	7.612	402	0,41	5	1	2	1	7
7. Banjar Serasan	10.585	673	1,14	3	1	1	1	5
Total	87.384	4856	8.78	29	8	8	6	43

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2014)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 jumlah penduduk di kelurahan tersebut sebanyak 11.564 jiwa, dengan perbandingan sebesar 6142

jiwa laki-laki dan 5422 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 0,30 km², menjadikan kawasan ini memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 38.546 jiwa per km². Jika kita merujuk pada data kemiskinan di kawasan tersebut, tampak masih banyak masyarakat yang di kategorikan miskin. Hal ini dapat di lihat dari data yang di himpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Pontianak pada tahun 2013, bahwa di kelurahan Tanjung Hilir terdapat 39 keluarga dalam kategori keluarga Pra Sejahtera atau tergolong sangat miskin serta 644 keluarga yang dikategorikan dalam keluarga sejahtera 1 atau keluarga yang tergolong miskin, dan total 683 keluarga miskin dari jumlah keluarga sebesar 3262 keluarga atau 20,93 % dari total keluarga di kelurahan tersebut (BPS, 2013). Tampak dari data tersebut bahwa, masalah sosial kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi pemerintah kota khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya yang harus ditanggulangi, agar tidak berkepanjangan.

Dalam berbagai upaya, program pembangunan bagi masyarakat miskin tetap menjadi prioritas pemerintah di berbagai daerah sebagaimana juga yang tertuang dalam amanat *Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3* yaitu: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, dan Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Serta Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak (UUD 1945). Berdasarkan landasan tersebut, mengandung arti bahwa masyarakat miskin juga memiliki hak

untuk hidup sejahtera, dengan mendapatkan haknya dari negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan, khususnya bantuan sosial ekonomi, yang nantinya dapat menjadi modal untuk memberdayakan masyarakat miskin. Namun dalam praktiknya, terkadang masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses sosial dan ekonomi. Negara di seluruh dunia juga sepakat bahwa program penanggulangan kemiskinan menjadi bagian utama dalam program *Millennium Development Goals (MDGs) 2015* atau Tujuan Pembangunan Millenium 2015 yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat berkualitas, sejahtera dan berdaya saing.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai Potret Kemiskinan Masyarakat Di Kota Pontianak dengan topik utama tentang kemiskinan pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi masalah merupakan proses penyederhanaan masalah yang rumit dan kompleks dirumuskan menjadi masalah yang dapat diteliti. Dari latar belakang di atas, kita dapat melihat gambaran tentang kemiskinan masyarakat di kota Pontianak, seperti di kelurahan Tanjung Hilir, agar pembahasan masalah tidak rancu, penulis memberikan Identifikasi atas permasalahan tersebut, Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1.2.1. Masih banyak terdapat masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Hilir.

1.2.2. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Tanjung Hilir disebabkan oleh faktor eksternal.

1.2.3. Kemiskinan berdampak destruktif pada kehidupan sosial masyarakat miskin.

1.3. Fokus Penelitian

Mengingat ruang lingkup permasalahan yang terpapar dalam latar belakang cukup luas, agar pembahasan lebih lanjut dapat terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan maka masalah penelitian ini perlu di fokuskan, adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bentuk Kemiskinan Yang Terdapat pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Tanjung Hilir Kota Pontianak”.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1.4.1. Bagaimana bentuk kemiskinan yang terdapat pada masyarakat miskin di kelurahan Tanjung Hilir ?

1.4.2. Apa faktor penyebab kemiskinan masyarakat di kelurahan Tanjung Hilir ?

1.5. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya, penelitian ini memiliki tujuan utama yang hendak dicapai. Adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

1.5.1. Untuk mendeskripsikan bentuk kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Hilir.

1.5.2. Untuk menganalisis faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di kelurahan Tanjung Hilir.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk membangun konsep baru yang berkaitan dengan kemiskinan dalam perspektif sosiologi pembangunan, untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah kemiskinan serta kontribusi pemikiran bagi penulis sendiri dalam proses penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber informasi bagi pemerintah, dalam memetakan daerah yang menjadi sasaran pembangunan baik, dari segi topografi maupun sosial sehingga diharapkan kebijakan penanganannya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat, sebagai masukan bagi institusi, seperti Dinas Sosial Kota, dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan serta perbaikan lingkungan dan fasilitas sosial. Dapat memberikan informasi bagi pemerhati masalah sosial, dan merangsang penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah sosial kemiskinan.